

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Menjalankan pembangunan daerah merupakan salah satu tugas dari penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan. Sebagai wujud dari implementasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah khususnya di Kabupaten Aceh Selatan dibutuhkan upaya, langkah dan strategi untuk mewujudkan pembangunan daerah. Strategi di sini merupakan kebijakan dalam mengimplementasikan program dan sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi dari Kepala Daerah yang kemudian disebut sebagai Bupati Aceh Selatan.

Untuk mewujudkan cita-cita dan pembangunan yang cepat tentu harus mendapatkan dukungan penuh oleh seluruh elemen pemerintahan baik Pemerintahan Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di Jakarta.

Seperti penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak terlepas dari sistem penyelenggaraan pemerintahan pusat (Indonesia). Untuk hal-hal tertentu diperlukan hubungan-hubungan koordinasi, konsultasi dan komunikasi antara pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dengan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, dalam rangka kelancaran pelaksanaan sebagian urusan-urusan pemerintah daerah Kabupaten dalam hal hubungan koordinasi dengan lembaga-lembaga departemen / non departemen di pusat serta dalam rangka pengembangan sosial budaya daerah, maka untuk efektifitas dibentuklah suatu Badan yang selanjutnya akan disebut dengan Kantor Penghubung / Perwakilan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan di ibukota Negara Jakarta.

Pembentukannya dilakukan melalui Peraturan Daerah yang disyaratkannya, mengingat mendesaknya waktu demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah Kabupaten yang berhubungan dengan instansi-instansi/lembaga-lembaga pemerintah departemen/non departemen di Ibu Kota Negara, Jakarta. Dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan perubahan dan

perkembangannya, dan dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien dalam hal hubungan antar lembaga serta membina masyarakat asal daerah Kabupaten Aceh Selatan, maka dibentuklah Badan Organisasi Kantor Perwakilan Daerah Kabupaten Aceh Selatan, di Jakarta sebagai Kantor Penghubung Kedinasan Daerah.

Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan adalah merupakan salah satu Badan Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang berkedudukan di Ibukota Jakarta serta merupakan representasi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Bobot dan beban kerja Kantor Perwakilan yang lebih intens adalah pada tugas-tugas pelayanan terhadap kegiatan Pejabat Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang melaksanakan Dinas di Ibu Kota Jakarta atau fasilitasi seperti penginapan dan tempat tinggal tentunya selama perjalanan dinas, maupun Koordinasi Pejabat Pusat yang akan melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh.

Anggaran Perjalanan Dinas yang dituangkan dalam APBD memerlukan perhatian khusus terutama dalam hal penginapan selama perjalanan dinas di Jakarta sehingga dapat merangsang penghematan biaya Perjalanan Dinas tersebut.

(Bidang Perencanaan Bappeda Aceh Selatan, 2013)

Berikut ini adalah data anggaran perjalanan dinas untuk penginapan di Jakarta tahun 2013.

ANGGARAN BIAYA PENGINAPAN DINAS KE JAKARTA					
URAIAN	JABATAN	SATUAN	VOLUME	NILAI SATUAN	TOTAL BIAYA
Biaya penginapan untuk Sekdakap	1 bupati	OH	120	Rp 850.000,00	Rp 102.000.000,00
	ibu bupati	OH	50	Rp 850.000,00	Rp 42.500.000,00
	adc	OH	100	Rp 500.000,00	Rp 50.000.000,00
	pengawal	OH	100	Rp 500.000,00	Rp 50.000.000,00
	sekpri ibu bupati	OH	30	Rp 500.000,00	Rp 15.000.000,00
	2 wabup	OH	40	Rp 850.000,00	Rp 34.000.000,00
	ibu wabup	OH	20	Rp 850.000,00	Rp 17.000.000,00
	adc	OH	40	Rp 500.000,00	Rp 20.000.000,00
	3 sekda	OH	120	Rp 800.000,00	Rp 96.000.000,00
	Asisten	OH	120	Rp 570.000,00	Rp 68.400.000,00
	Staf Ahli dan Kabag	OH	100	Rp 550.000,00	Rp 55.000.000,00
Camat	OH	20	Rp 550.000,00	Rp 11.000.000,00	
Biaya penginapan untuk DPRK	1 ketua DPRK	OH	80	Rp 800.000,00	Rp 64.000.000,00
	wakil ketua	OH	80	Rp 800.000,00	Rp 64.000.000,00
	anggota	OH	50	Rp 570.000,00	Rp 28.500.000,00
	sekwan	OH	20	Rp 550.000,00	Rp 11.000.000,00
Biaya penginapan untuk masing-masing dinas dan badan	1 kepala dinas	OH	40	Rp 570.000,00	Rp 615.600.000,00
	kepala bidang	OH	40	Rp 550.000,00	Rp 594.000.000,00
TOTAL ANGGARAN BIAYA PENGINAPAN PER TAHUN					Rp 1.938.000.000,00

Gambar I.1 Anggaran Biaya Penginapan Perjalanan Dinas 2013

Besarnya SPPD penginapan untuk pejabat daerah (PNS dan non PNS), dinas – dinas terkait ditentukan oleh besarnya golongan dan Aselon, seperti Aselon II, III, IV dan untuk non PNS maka akan disesuaikan dengan jabatan yang dipangku. Maka untuk meminimalisir pemborosan anggaran untuk biaya penginapan, akan dibentuk sebuah Badan yang selanjutnya disebut Kantor Penghubung / Perwakilan Aceh Selatan. (Bidang Anggaran Dinas Keuangan Aceh Selatan,2013).

I.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana analisis pembangunan kantor penghubung / perwakilan PEMDA Aceh Selatan di Jakarta dari aspek teknis, manajemen, keuangan?
2. Bagaimana kelayakan investasi pembangunan kantor penghubung / perwakilan PEMDA Aceh Selatan di Jakarta dilihat dari efisiensi biaya,?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui aspek teknis, manajemen, keuangan dari pembangunan kantor penghubung / perwakilan PEMDA Aceh Selatan di Jakarta.
2. Untuk mengetahui tingkat kelayakan investasi pembangunan kantor penghubung / perwakilan PEMDA Aceh Selatan di Jakarta dilihat dari efisiensi biaya.

I.4 Manfaat Penelitian

1. Membantu pihak PEMDA Aceh Selatan untuk mengetahui kelayakan perencanaan dan Pembangunan Kantor Penghubung/ Perwakilan Aceh Selatan di Jakarta melalui berbagai analisa yang telah dilakukan.
2. Sebagai evaluasi bagi PEMDA dalam upaya penghematan APBD untuk perjalanan dinas pejabat daerah, PNS Kabupaten, honorer baik tetap maupun tidak tetap.
3. Menyediakan sarana, prasarana dan mobilitas yang diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan terkait.
4. Bersama-sama dengan dinas teknis untuk mendampingi tugas kedinasan, rapat, promosi, dan kegiatan yang terkait dengan kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten aceh selatan.
5. Menyampaikan informasi yang terkait berkenaan dengan urusan kedinasan di Jakarta kepada pejabat yang terkait akan hal tersebut.

6. Memberikan pelayanan kepada Pejabat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
7. Melakukan kegiatan-kegiatan seperti promosi, pameran, eksebisi di Jakarta.
8. Sebagai tempat silaturahmi kedaerahan.

I.5 Batasan Penelitian

1. Data primer diperoleh melalui Bappeda dan Dinas Keuangan Kabupaten Aceh Selatan.
2. Pembahasan hanya pada layak atau tidaknya didirikan Kantor Penghubung/ Perwakilan Pemda Aceh Selatan di Jakarta.
3. Penelitian ini akan membahas aspek teknis, aspek manajemen dan aspek keuangan.
4. Suku bunga, inflasi, pajak dan kondisi ekonomi lainnya dianggap konstan selama penelitian dilakukan.
5. Pegawai negeri yang dimaksud adalah Pejabat Daerah (PNS dan Non PNS), dinas – dinas terkait, Aselon II, III, IV.